

Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemimpin dalam Politik Indonesia Ditinjau Dari Nilai Amanah dan Keadilan dalam Politik Islam

Siti Khofifah Hanif¹, Muammar El Zaidan², Adika Sanjaya³, Sugianto⁴
^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

E-mail: khofifahhanifsiti20@gmail.com¹, mzaydhan12@gmail.com²,
sanjayaadika2@gmail.com, sugianto202@unimed.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received March 22, 2026
Revised March 26, 2026
Accepted March 28, 2026

Keywords:

Public Trust, Political Leadership, Integrity, Justice, Islamic Politics

ABSTRACT

This study aims to analyze the crisis of public trust in leaders within Indonesian politics by examining it from the perspective of the values of trustworthiness and justice in Islamic politics. Public trust is a crucial element in the legitimacy and effectiveness of governance; however, in practice, it often declines due to various factors such as corruption, abuse of power, and the discrepancy between political promises and policy realities. This study employs a qualitative approach using a literature review method drawing from the Qur'an, hadith, classical Islamic works, and modern academic literature. The findings indicate that the crisis of trust is not only caused by weaknesses in the administrative system but also by the low implementation of moral values in leadership. From an Islamic political perspective, trustworthiness (amanah) and justice are the primary pillars determining a leader's moral legitimacy. Trustworthiness demands responsibility, honesty, and integrity, while justice emphasizes equitable treatment, consistent enforcement of the law, and a focus on the public interest. The failure to fulfill these two values leads to a gap between formal and moral legitimacy, which ultimately triggers a crisis of public trust. Therefore, integrating the values of amanah and justice into leadership practices is a crucial solution for rebuilding public trust in political leaders in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received March 22, 2026
Revised March 26, 2026
Accepted March 28, 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dalam politik Indonesia dengan meninjau dari perspektif nilai amanah dan keadilan dalam politik Islam. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam legitimasi dan efektivitas pemerintahan, namun dalam praktiknya

Kata Kunci:

Kepercayaan Publik,
Kepemimpinan Politik,
Amanah, Keadilan, Politik
Islam Biologi, Penelitian
Tindakan Kelas

sering mengalami penurunan akibat berbagai faktor seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidaksesuaian antara janji politik dan realitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, karya klasik Islam, serta literatur akademik modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis kepercayaan tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem administratif, tetapi juga oleh rendahnya implementasi nilai moral dalam kepemimpinan. Dalam perspektif politik Islam, amanah dan keadilan merupakan pilar utama yang menentukan legitimasi moral seorang pemimpin. Amanah menuntut tanggung jawab, kejujuran, dan integritas, sedangkan keadilan menekankan pada perlakuan yang setara, penegakan hukum yang konsisten, serta orientasi pada kepentingan publik. Ketidakterpenuhan kedua nilai tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan antara legitimasi formal dan legitimasi moral, yang pada akhirnya memicu krisis kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai amanah dan keadilan dalam praktik kepemimpinan menjadi solusi penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemimpin politik di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Siti Khofifah Hanif
Universitas Negeri Medan
E-mail: khofifahhanif20@gmail.com

PENDAHULUAN

Kepercayaan publik terhadap pemimpin politik merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi modern karena memengaruhi legitimasi pemerintahan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Ketika kepercayaan menurun, hal ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi politik, meningkatnya skeptisisme terhadap institusi negara, serta berkurangnya efektivitas implementasi kebijakan. Fenomena krisis kepercayaan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di banyak negara demokratis di seluruh dunia (Weber, 1922).

Di Indonesia sendiri, meskipun terdapat beberapa survei yang menunjukkan angka kepercayaan terhadap lembaga negara dan presidennya dalam kisaran tinggi (misalnya, survei tingkat kepercayaan publik terhadap presiden mencapai sekitar 82,7% menurut lembaga Indikator Politik Indonesia), terdapat juga data yang menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap isu korupsi yang terus menjadi masalah utama. Misalnya, menurut laporan media, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada level 34 pada 2024 yang menunjukkan masih tingginya persepsi praktik korupsi dan stagnasi keberhasilan pemberantasan korupsi. Kondisi ini dapat memicu ketidakpuasan publik terhadap pemimpin, meskipun kepercayaan terhadap posisi tertentu masih terlihat tinggi.

Secara teoritik, *kepercayaan publik* dapat didefinisikan sebagai keyakinan masyarakat bahwa pemimpin dan institusi pemerintahan akan menjalankan tugasnya sesuai dengan norma,

etika, dan harapan kolektif masyarakat (Weber, 1922). Dalam konteks kepemimpinan Islam, kepercayaan publik juga sangat terkait dengan kualitas moral pemimpin, terutama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan **amanah** dan **keadilan**.

Nilai **amanah** dalam Islam berarti pemimpin harus memenuhi tanggung jawab moral dan sosial yang dipercayakan kepadanya dengan jujur dan bertanggung jawab. Muhammad Asad menyatakan bahwa pemerintahan Islam bukan hanya soal kekuasaan administratif, tetapi merupakan pelaksanaan tugas yang bersifat moral dan spiritual berdasarkan prinsip syariat yang menempatkan pemimpin sebagai pemegang *trust* dalam urusan rakyat (Asad, 1961). Di samping itu, nilai **keadilan (al-'adl)** juga dipandang sebagai pilar utama legitimasi pemerintahan dalam tradisi Islam. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menekankan bahwa seorang pemimpin yang adil harus menegakkan aturan dan perlakuan yang seimbang bagi semua warga, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan (Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*).

Dari perspektif teori tata pemerintahan Islam, penerapan amanah dan keadilan menjadi ukuran utama legitimasi dan efektivitas kepemimpinan, karena keduanya memengaruhi kesesuaian praktik pemerintahan dengan nilai moral yang diakui oleh masyarakat Muslim (Asad, 1961; Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*). Namun dalam praktik nyata, krisis kepercayaan sering disebabkan oleh berbagai faktor seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan janji politik yang tidak ditepati yang berkontribusi pada persepsi publik bahwa nilai moral dalam politik belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten.

Meski sudah banyak studi tentang kepercayaan publik dan good governance di Indonesia maupun negara lain, sebagian besar penelitian cenderung fokus pada aspek teknis pemerintahan atau indikator administratif tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara nilai amanah dan keadilan menurut perspektif politik Islam dengan krisis kepercayaan masyarakat. Ada gap antara data empiris yang menunjukkan adanya fenomena kepercayaan publik yang fluktuatif dan teori normatif Islam tentang kualitas kepemimpinan yang ideal. Penelitian ini mencoba mengisi gap tersebut dengan menelaah secara kualitatif hubungan antara rendahnya penerapan nilai amanah dan keadilan dalam praktik kepemimpinan di Indonesia dengan fenomena krisis kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini menarik karena ia tidak hanya mengevaluasi fenomena kepercayaan publik secara empiris, tetapi juga menghubungkannya dengan *framework* normatif Islam tentang tata kepemimpinan yang etis dan berintegritas. Dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari buku teori politik Islam, Al-Qur'an, hadis, dan literatur akademik lain, penelitian ini menawarkan kontribusi bagi kajian kepemimpinan Islam dan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana nilai moral dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari solusi terhadap persoalan kepercayaan publik terhadap pemimpin di Indonesia.

KAJIAN TEORI

1. Kepercayaan Publik terhadap Pemimpin

Kepercayaan publik terhadap pemimpin merupakan fondasi utama legitimasi politik dan efektivitas pemerintahan. Tanpa kepercayaan ini, masyarakat cenderung skeptis terhadap kebijakan yang diterapkan, partisipasi politik menurun, dan potensi konflik sosial meningkat. Menurut Max Weber (1922), legitimasi pemimpin bukan hanya ditentukan oleh kekuasaan

administratif atau kemampuan memerintah, tetapi berasal dari pengakuan masyarakat terhadap otoritas pemimpin. Weber membagi otoritas sah menjadi tiga tipe ideal: pertama, legal-rational authority, yaitu kekuasaan yang diterima masyarakat karena berdasarkan aturan hukum dan prosedur yang sah; kedua, traditional authority, yaitu kekuasaan yang diakui karena tradisi atau kebiasaan yang sudah mengakar; dan ketiga, charismatic authority, yaitu kekuasaan yang diterima karena karisma, kemampuan pribadi, dan keyakinan masyarakat terhadap pemimpin.

Dalam fenomena krisis kepercayaan publik terhadap pemimpin kerap muncul karena sejumlah faktor. Data survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan meskipun tingkat kepercayaan publik terhadap presiden cukup tinggi, masyarakat tetap khawatir terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi yang stagnan pada angka 34 pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara legitimasi formal pemimpin dan persepsi masyarakat terhadap praktik kepemimpinan nyata. Dalam literatur sosiopolitik, fenomena ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan yang efektif harus memenuhi dua syarat: pengakuan legal dan administratif, dan kepercayaan moral masyarakat, karena tanpa keduanya, kepemimpinan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya.

2. Konsep Amanah dalam Kepemimpinan Islam

Dalam politik Islam, kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan administratif atau popularitas pemimpin, tetapi juga oleh kualitas moralnya. Nilai amanah berarti pemimpin menunaikan tanggung jawab moral, sosial, dan politik secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai prinsip syariat. Muhammad Asad (1961) dalam *The Principles of State and Government in Islam* menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar kekuasaan, tetapi merupakan amanah besar yang harus dilaksanakan dengan integritas dan moralitas tinggi. Pemimpin yang tidak menunaikan amanah akan kehilangan legitimasi moral, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik.

Al-Qur'an menegaskan prinsip amanah: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin wajib menegakkan tanggung jawab moral dan sosial. Dalam literatur kepemimpinan Islam, amanah tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif: pemimpin memikul tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip amanah akan memunculkan krisis kepercayaan publik, karena masyarakat merasakan ketidaksesuaian antara janji kepemimpinan dan praktik nyata yang dijalankan.

3. Konsep Keadilan dalam Kepemimpinan Islam

Selain amanah, keadilan menjadi pilar moral yang menentukan legitimasi pemerintahan dalam Islam. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menekankan bahwa pemimpin yang adil harus menegakkan hukum secara konsisten, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban warga, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keadilan tidak hanya berarti netralitas, tetapi perlindungan aktif terhadap hak publik dan kesejahteraan masyarakat. Khan (2019) menekankan bahwa amanah dan keadilan merupakan inti dari good governance dalam perspektif Islam, sehingga penerapan nilai moral ini secara konsisten dapat membangun kembali kepercayaan publik dan meningkatkan legitimasi pemimpin di mata masyarakat.

4. Hubungan Amanah, Keadilan, dan Krisis Kepercayaan

Krisis kepercayaan masyarakat terjadi ketika nilai amanah dan keadilan tidak diterapkan secara konsisten dalam praktik kepemimpinan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan janji politik yang tidak ditepati. Studi sebelumnya cenderung fokus pada aspek teknis pemerintahan atau indikator persepsi publik, sehingga masih terdapat gap penelitian mengenai hubungan langsung antara krisis kepercayaan masyarakat dengan nilai amanah dan keadilan menurut perspektif politik Islam. Gap ini menjadi dasar bagi penelitian untuk menganalisis hubungan normatif dan empiris secara bersamaan.

5. Kemenarikan Penelitian

Penelitian ini menarik karena menggabungkan data empiris tentang persepsi publik dengan kerangka normatif Islam terkait amanah dan keadilan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah faktor penyebab krisis kepercayaan, tetapi juga menawarkan solusi berbasis prinsip moral Islam. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi kajian kepemimpinan, tata pemerintahan yang etis, dan pembangunan legitimasi politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara konseptual dan normatif hubungan antara krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dengan nilai amanah dan keadilan dalam perspektif politik Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku terkait politik Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga survei, serta sumber utama ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan referensi klasik seperti karya Al-Mawardi serta pemikiran tokoh modern seperti Muhammad Asad yang relevan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian berbagai sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap pembahasan mengenai kepercayaan publik, amanah, keadilan, dan kepemimpinan politik.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan deduktif dan interpretatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menginterpretasikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan nilai amanah dan keadilan dalam politik Islam, kemudian dikaitkan dengan fenomena krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin di Indonesia. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang

lebih komprehensif dan objektif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai hubungan antara nilai-nilai moral dalam Islam dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Kepercayaan Publik di Indonesia

Kepercayaan publik merupakan elemen krusial dalam menjaga stabilitas dan efektivitas kepemimpinan, baik dalam ranah politik maupun sains. Dalam perspektif Max Weber, legitimasi kepemimpinan tidak hanya bersumber dari kekuasaan formal, tetapi juga dari pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Weber menjelaskan bahwa otoritas dapat diterima melalui tiga bentuk utama, yaitu rasional-legal yang berbasis aturan, tradisional yang bersumber dari kebiasaan, serta karismatik yang bertumpu pada kualitas personal pemimpin.

Jika dikaitkan dengan temuan survei terbaru, terlihat adanya variasi tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai aktor sosial. Di Amerika Serikat, saintis memperoleh tingkat kepercayaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan politisi, pemimpin bisnis, maupun jurnalis. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi berbasis rasionalitas dan kompetensi ilmiah yang sejalan dengan konsep otoritas rasional-legal Weber masih memiliki posisi kuat di mata publik. Namun demikian, adanya persepsi bahwa sebagian saintis kurang komunikatif dan cenderung merasa superior menunjukkan bahwa legitimasi tersebut belum sepenuhnya sempurna secara sosial.

Dalam konteks Indonesia, tingkat kepercayaan terhadap saintis juga tergolong tinggi, bahkan mendekati tingkat kepercayaan di Amerika. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih memberikan pengakuan terhadap otoritas berbasis keilmuan. Menariknya, faktor religiusitas di beberapa negara, termasuk negara mayoritas Muslim, justru memperkuat kepercayaan terhadap sains. Hal ini menandakan adanya integrasi antara nilai keagamaan dan rasionalitas ilmiah, yang secara tidak langsung memperluas basis legitimasi sosial para saintis.

Namun, jika dibandingkan dengan kepercayaan terhadap pemimpin politik, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Meskipun secara formal pemimpin memiliki legitimasi melalui mekanisme hukum dan demokrasi, kepercayaan publik tidak selalu sejalan dengan legitimasi tersebut. Kasus Indonesia menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepercayaan terhadap presiden relatif tinggi, kekhawatiran terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tetap ada. Hal ini mencerminkan adanya jarak antara legitimasi formal (legal-rational authority) dan legitimasi moral yang dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, baik dalam konteks saintis maupun pemimpin politik, kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas formal atau keahlian, tetapi juga oleh kemampuan membangun kedekatan sosial, komunikasi yang efektif, serta integritas moral. Dalam era pascakebenaran, tantangan ini menjadi semakin kompleks karena masyarakat tidak selalu mendasarkan penilaiannya pada fakta objektif, melainkan juga pada persepsi, emosi, dan narasi yang berkembang di ruang publik.

Oleh karena itu, konsep intelektual publik menjadi relevan sebagai jembatan antara otoritas keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Saintis tidak cukup hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga dituntut untuk terlibat aktif dalam komunikasi publik, advokasi kebijakan, serta menjaga sikap rendah hati intelektual. Dengan cara ini, legitimasi yang dimiliki

tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga memperoleh pengakuan sosial yang lebih luas, sebagaimana ditekankan dalam kerangka teori Weber.

2. Konsep Amanah dalam Kepemimpinan Islam

Konsep amanah dalam kepemimpinan Islam menempatkan kepemimpinan sebagai sebuah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan penuh kesadaran akan pertanggungjawaban kepada Tuhan dan masyarakat. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa amanah bukan sekadar kepercayaan sosial, tetapi juga batasan etis bagi pemimpin agar tidak menyalahgunakan kekuasaan serta senantiasa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Pemimpin yang amanah dituntut untuk bersikap transparan, menepati janji, serta menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran.

Jika dikaitkan dengan temuan survei kepercayaan publik, terlihat bahwa kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap integritas dan orientasi kepentingan publik. Tingginya kepercayaan terhadap saintis dibandingkan politisi menunjukkan bahwa publik lebih menghargai aktor yang dianggap bekerja secara objektif, berbasis fakta, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Dalam perspektif Islam, karakter tersebut sejalan dengan nilai amanah, di mana seorang pemimpin atau figur publik harus mengedepankan kebenaran dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Namun demikian, adanya persepsi bahwa sebagian saintis kurang komunikatif dan terkesan superior menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya dibangun dari kompetensi, tetapi juga dari sikap rendah hati dan kedekatan dengan masyarakat. Hal ini selaras dengan konsep amanah yang tidak hanya menuntut kejujuran, tetapi juga keterbukaan dan tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin yang amanah tidak boleh menjauh dari rakyat, melainkan harus hadir untuk mendengar, melayani, dan merespons kebutuhan mereka.

Dalam konteks Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap saintis yang relatif tinggi menunjukkan adanya potensi besar untuk membangun kepemimpinan berbasis nilai amanah. Apalagi dalam masyarakat yang religius, amanah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai bagian dari keimanan. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat diperkuat jika pemimpin mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral, religius, dan profesional dalam praktik kepemimpinannya.

Sebaliknya, rendahnya kepercayaan terhadap sebagian pemimpin politik mencerminkan adanya krisis amanah, yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara janji dan tindakan, serta maraknya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perspektif Islam, kondisi ini menunjukkan kegagalan pemimpin dalam menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepadanya, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, konsep amanah dalam kepemimpinan Islam memiliki relevansi yang kuat dengan dinamika kepercayaan publik saat ini. Amanah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai indikator utama dalam membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Pemimpin yang mampu menjaga Amanah melalui integritas, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan public akan lebih mudah memperoleh kepercayaan,

sebagaimana terlihat pada tingginya kepercayaan publik terhadap figur yang dianggap objektif dan berorientasi pada kebaikan bersama.

3. Konsep Keadilan dalam Kepemimpinan Islam

Konsep keadilan dalam kepemimpinan Islam menempatkan keadilan (al-'adl) sebagai prinsip fundamental dalam menjalankan kekuasaan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk bersikap netral, tetapi juga aktif memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi secara seimbang serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perspektif ini, keadilan mencakup penegakan hukum yang konsisten, distribusi kesejahteraan yang merata, serta perlindungan terhadap kelompok yang lemah, sehingga kepemimpinan tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

Jika dikaitkan dengan temuan survei kepercayaan publik, terlihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan yang dijalankan oleh aktor publik. Tingginya kepercayaan terhadap saintis dibandingkan politisi menunjukkan bahwa publik lebih mempercayai pihak yang dianggap objektif, berbasis bukti, dan tidak bias kepentingan. Hal ini mencerminkan bahwa keadilan dalam praktik yakni keputusan yang rasional, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kepentingan umum menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Namun, adanya kekhawatiran publik terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa krisis kepercayaan sering kali berakar pada kegagalan dalam mewujudkan keadilan secara nyata. Ketika kebijakan dianggap tidak adil, diskriminatif, atau hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka legitimasi pemimpin akan menurun. Dalam perspektif kepemimpinan Islam, kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara nilai normatif keadilan dan praktik politik yang terjadi di lapangan.

Selain itu, harapan publik agar aktor seperti saintis lebih terlibat dalam pengambilan kebijakan menunjukkan adanya tuntutan terhadap proses yang lebih adil dan berbasis pengetahuan. Keterlibatan pihak yang dianggap objektif diharapkan dapat meminimalisasi bias politik dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Dalam konteks Islam, hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menuntut keputusan didasarkan pada kebenaran dan kemaslahatan, bukan kepentingan sempit.

Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat religiositas tinggi, konsep keadilan tidak hanya dipahami sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai nilai moral dan religius. Oleh karena itu, kegagalan pemimpin dalam menegakkan keadilan tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga pada penurunan kepercayaan moral masyarakat. Sebaliknya, pemimpin yang mampu menegakkan keadilan secara konsisten akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena dianggap selaras dengan nilai etika dan keagamaan yang dianut masyarakat.

Dengan demikian, konsep keadilan dalam kepemimpinan Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan dinamika kepercayaan publik. Keadilan bukan sekadar prinsip normatif, tetapi menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kepemimpinan. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi akan lebih mudah tercapai jika pemimpin mampu menunjukkan praktik keadilan yang nyata melalui kebijakan yang transparan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

4. Relasi Amanah, Keadilan, dan Kepercayaan

Hubungan antara amanah, keadilan, dan krisis kepercayaan dalam kepemimpinan dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam membentuk legitimasi publik. Dalam perspektif kepemimpinan Islam, amanah dan keadilan merupakan dua pilar utama yang menentukan kualitas moral seorang pemimpin. Ketika kedua nilai ini dijalankan secara konsisten, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara alami. Sebaliknya, kegagalan dalam menerapkan amanah dan keadilan akan memicu krisis kepercayaan yang berdampak pada melemahnya legitimasi kepemimpinan.

Jika dikaitkan dengan temuan survei global, terlihat bahwa kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap integritas, objektivitas, dan orientasi pada kepentingan umum. Tingginya kepercayaan terhadap saintis dibandingkan politisi menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya pada aktor yang dinilai bekerja secara jujur, berbasis fakta, dan berfokus pada penyelesaian masalah. Hal ini secara konseptual selaras dengan nilai amanah dan keadilan, di mana seorang pemimpin dituntut untuk bertindak secara transparan, adil, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.

Namun demikian, data juga menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek komunikasi dan sikap sosial, seperti persepsi bahwa sebagian aktor publik bersikap superior atau kurang dekat dengan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh kompetensi atau kapasitas teknis, tetapi juga oleh kemampuan membangun relasi sosial yang adil dan inklusif. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai sikap yang menghargai kesetaraan dan menjauhkan diri dari kesombongan.

Dalam konteks Indonesia, fenomena tingginya kepercayaan formal terhadap pemimpin yang tidak sepenuhnya diiringi dengan kepuasan terhadap praktik pemerintahan menunjukkan adanya kesenjangan antara legitimasi administratif dan legitimasi moral. Kekhawatiran masyarakat terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi indikator bahwa nilai amanah dan keadilan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik kepemimpinan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa krisis kepercayaan muncul bukan semata karena lemahnya sistem, tetapi juga karena rendahnya kualitas moral dalam menjalankan kekuasaan.

Lebih lanjut, harapan publik agar aktor berpengetahuan terlibat dalam proses kebijakan menunjukkan keinginan masyarakat terhadap kepemimpinan yang lebih adil, rasional, dan berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan keseimbangan antara nilai moral dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, integrasi antara amanah, keadilan, dan pendekatan ilmiah dapat menjadi solusi dalam mengatasi krisis kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, hubungan antara amanah, keadilan, dan krisis kepercayaan menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui praktik kepemimpinan yang berlandaskan nilai moral. Ketika amanah dilanggar dan keadilan diabaikan, maka kepercayaan masyarakat akan menurun, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan nilai amanah dan keadilan menjadi kunci utama dalam memulihkan dan menjaga kepercayaan publik dalam kehidupan politik modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dalam politik Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor administratif atau kelemahan sistem pemerintahan, tetapi juga berkaitan erat dengan rendahnya implementasi nilai-nilai moral, khususnya amanah dan keadilan. Meskipun secara formal legitimasi pemimpin dapat diperoleh melalui mekanisme demokrasi, kepercayaan publik pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana pemimpin mampu menunjukkan integritas, tanggung jawab, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat secara nyata.

Dalam perspektif politik Islam, amanah dan keadilan merupakan dua pilar utama yang menentukan kualitas kepemimpinan. Amanah menuntut pemimpin untuk menjalankan kekuasaan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sedangkan keadilan mengharuskan adanya perlakuan yang setara, penegakan hukum yang konsisten, serta kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Ketika kedua nilai ini tidak dijalankan secara optimal, maka akan muncul kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realitas kepemimpinan, yang pada akhirnya memicu krisis kepercayaan publik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya kepercayaan formal terhadap pemimpin tidak selalu sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap praktik pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa legitimasi administratif belum cukup untuk mempertahankan kepercayaan publik tanpa diiringi legitimasi moral. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan perbaikan sistem, tetapi juga memerlukan penguatan nilai etika dan moral dalam praktik kepemimpinan.

Dengan demikian, integrasi nilai amanah dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan menjadi kunci utama dalam membangun kembali kepercayaan publik. Pemimpin yang mampu menginternalisasi dan mengimplementasikan kedua nilai tersebut secara konsisten akan memiliki legitimasi yang lebih kuat, tidak hanya secara formal tetapi juga secara moral, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahkam al-Sultaniyyah Al-Mawardi. (n.d.). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Baghdad: Abbasid Caliphate.
- Al-Mawardi. (n.d.). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*.
- Amīn, Ahmad. (1931). *Al-Akhlāq*. Kairo: Dār al-Kutub.
- Asad, Muhammad. (1961). *The Principles of State and Government in Islam*.
- Indikator Politik Indonesia. (2024). *Survei tingkat kepercayaan publik terhadap presiden*.
- Kepercayaan Publik Mengkhawatirkan, Saatnya Parpol Berbenah. Rosit, M. (2025, Februari 4). *Kepercayaan Publik Mengkhawatirkan, Saatnya Parpol Berbenah*. Kompas.com.
- Pengadilan Agama Unaaha. (n.d.). *Konsep keadilan menurut Al-Qur'an*. Diakses dari [Konsep keadilan menurut Al-Qur'an](#)
- Pengadilan Agama Unaaha. (n.d.). *Konsep keadilan menurut Al-Qur'an*. Diakses dari <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/konsep-keadilan-menurut-al-quran/>



- Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke Presiden 82,7%. Ernes, Y. (2025, Mei 27). *Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke Presiden 82,7%*. DetikNews.
- Tripartite classification of authority. Weber, M. (1922). *Tripartite classification of authority*. Dalam *Economy and Society*.
- Universitas Islam Indonesia. (2025). *Kepercayaan publik terhadap saintis*. Kepercayaan publik terhadap saintis
- Universitas Islam Indonesia. (2025). *Kepercayaan publik terhadap saintis*. Diakses dari <https://www.uii.ac.id/kepercayaan-publik-terhadap-saintis/>
- Weber, Max. (1922). *Economy and Society*.
- Zulkarnain. (2021). Konsep keadilan dalam teologi Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 3(1).